

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan luar negeri merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak abad ke-19. Hjertholm dan White melacak akar bantuan luar negeri di lihat dari bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS) ke negara-negara koloninya¹. Bantuan luar negeri AS tercantum pada Undang-Undang 1812 berupa bantuan pinjaman dan hibah untuk pembangunan. Perkembangan bantuan luar negeri semakin masif dijalankan ketika AS mengimplementasikan Marshal Plan dan mulai terbentuknya organisasi seperti *United Nation* (UN), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank* (WB). Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam mengelola dana internasional untuk bantuan luar negeri. Namun seiring perkembangan zaman, bantuan luar negeri mengalami pergeseran perspektif mengenai aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri dari negara pendonor. Adalah wajar hal ini terjadi karena perkembangan zaman yang terus berubah serta kebutuhan negara pendonor untuk mencapai kepentingan nasionalnya².

Bantuan luar negeri merupakan alat kebijakan luar negeri suatu negara³. Hal ini dipergunakan untuk menjalankan strategi negara dalam hubungan luar negeri. Secara singkat, Chenery dan Strout mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai arus

¹ Peter Hjertholm and Howard White, 2000, *Foreign aid and development: lessons learnt and directions for the future*, London: Routledge, 80-102.

² Victoria Williams, Foreign Aid, diakses pada <https://www.britannica.com/topic/foreign-aid>, (22/12/2019,16:18 WIB)

³ Carol Lancaster, 2007, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, London: Chicago Press, Hlm 9

masuk sumber daya eksternal⁴. Selain itu, Morgenthau mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, barang, dan jasa dari satu negara ke negara lain⁵. Lebih lanjut, Morgenthau menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah untuk mencapai kepentingannya⁶.

Bantuan luar negeri memiliki beberapa bentuk seperti bantuan dana, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pembangunan ekonomi. Bantuan ini dapat mendanai beragam kegiatan di negara penerima seperti proyek investasi, kegiatan penelitian teknis, bantuan makanan yang membantu mewujudkan tujuan dari negara pendonor dan penerima⁷. Bantuan luar negeri akan menjadi simbol dan sinyal politik yang kuat ketika bantuan tersebut berasal dari negara yang kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya motif tersendiri dari negara pendonor kepada negara penerima. Negara kuat tersebut di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Perancis dan lainnya. Amerika Serikat memberikan bantuan untuk menjaga perdamaian sekaligus mempromosikan sistem demokrasi di negara penerima⁸. Jepang memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang untuk kepentingan ekonomi dan akses perdagangan. Sedangkan tujuan Perancis memberikan bantuan luar negeri untuk dengan motivasi diplomatik⁹.

Selama perkembangannya, bukan hanya negara-negara adidaya saja yang memberikan bantuan luar negeri namun negara-negara donor baru pun melakukan

⁴ Hollis B. Chenery and Alan M. Strout, *Foreign Assistance and Economic Development*, The American Economic Review, Vol, 56, No, 54, American Economic Association Publisher, hal. 3.

⁵ Hans Morgenthau, *A Political of Foreign Aid*, The American Economic Review, Vol, 56, No, 2, American Economic Association Publisher, hal. 301

⁶ Ibid., 304

⁷ Op. Cit. Hlm. 11

⁸ Victoria Williams, Op.Cit, diakses pada <https://www.britannica.com/topic/foreign-aid> (22/12/2019, 16:31 WIB)

⁹ Lancaster, Op. Cit, Hlm 6

hal yang sama, salah satunya adalah China. China dikategorikan oleh UN sebagai negara berkembang namun secara ekonomi China menempati posisi kedua ekonomi terbesar di dunia¹⁰. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan luar negeri China. Prioritas kebijakan luar negeri China adalah mempertahankan China yang kuat, mandiri dan bersatu untuk mengejar prioritas utama yaitu pembangunan ekonomi.

Dalam melakukan pembangunan ekonomi, China tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan domestiknya sendiri. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya negara lain merupakan motif utama China untuk melakukan investasi baik di tingkat regional maupun global. Bantuan luar negeri merupakan strategi yang penting untuk mewujudkan kepentingan politik maupun ekonomi China. Jadi, China pun turut memberikan bantuan luar negeri ke negara lain. Bentuk bantuan luar negeri yang tertuang dalam *White Paper*¹¹ yaitu berupa hibah, pinjaman tanpa bunga dan pinjaman lunak.

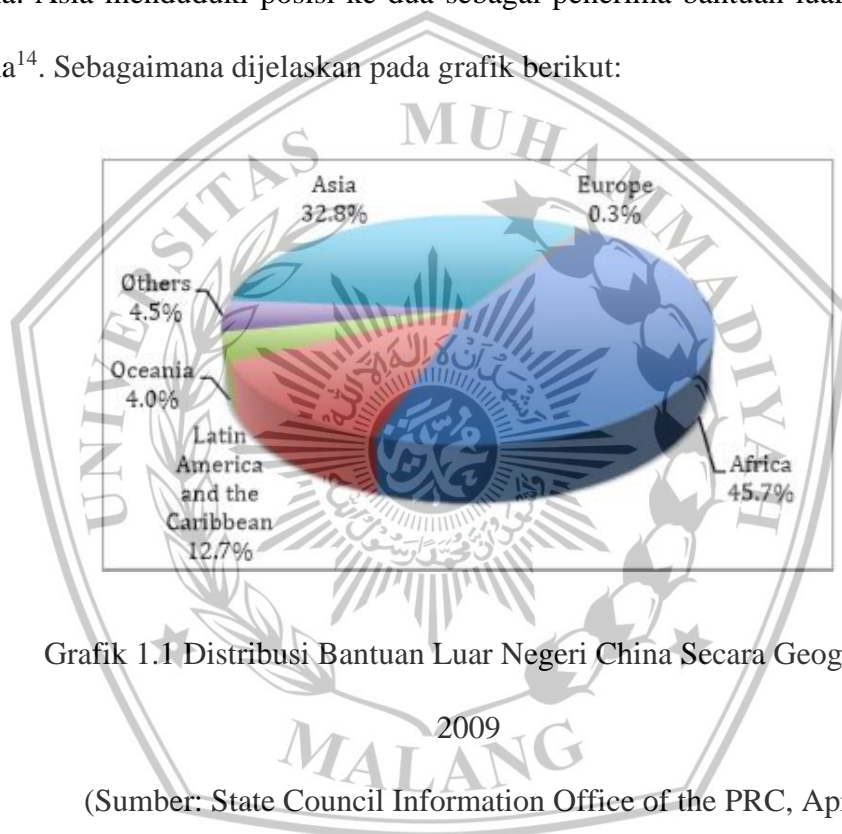
Rilisnya *White Paper* bantuan luar negeri China yang berisi informasi tentang prinsip dasar serta volume bantuan ini telah mengesampingkan motif yang telah disebutkan di atas. Menurut dokumen ini, China telah memberikan bantuan total bantuan sebesar Renminbi (RMB) 256,3 miliar kepada negara-negara semenjak tahun 1950¹², termasuk hibah sebesar RMB106,2 miliar, RMB76,54 miliar dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan RMB73,55 miliar dalam pinjaman lunak.

¹⁰ The World Bank, *The World Bank in China*, diakses dalam <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview> (12/4/2019,19:48)

¹¹ State Council Information Office of the PRC, 2011, "White Paper on China's Foreign Aid"

¹² Ibid

China telah memberikan bantuan luar negeri ke beberapa kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, Pasifik dan Asia. Secara rinci, bantuan China telah mencapai 161 negara, di antaranya 30 di Asia, 51 di Afrika, 18 di Amerika Latin dan Karibia, 12 di Oceania dan 12 di Eropa Timur¹³. Sekitar 80% bantuan China diberikan kepada Afrika dan Asia yang merupakan kawasan yang menarik bagi China. Asia menduduki posisi ke dua sebagai penerima bantuan luar negeri dari China¹⁴. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:



Untuk kawasan Asia, China lebih berfokus pada pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos. Laos telah mendapatkan bantuan luar negeri dari China sejak tahun 1961 namun China menarik kembali bantuan tersebut pada tahun

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid., Hlm, 9

1970 karena adanya dukungan Laos untuk invasi Vietnam ke Kamboja¹⁵. Namun, pada tahun 1980 di mana tren regional dan internasional berkembang, Laos secara proaktif memulai kembali untuk rekonsiliasi dengan China karena adanya kebutuhan untuk pembangunan. Dengan adanya kesempatan ini, China mulai masif memberikan bantuan luar negeri kepada Laos dengan tujuan tertentu.

Pemberiaan bantuan luar negeri China kepada Laos dimulai dengan hubungan bilateral hingga pada bantuan luar negeri melalui mekanisme *Belt and Road Initiative* (BRI) yang merupakan inisiatif China untuk mengembangkan ekonomi negara-negara dan juga meningkatkan konektivitas global¹⁶. Selain itu, secara spesifik, bantuan luar negeri kepada Laos berada dalam mekanisme *Lancang Mekong Cooperation* (LMC) di mana LMC adalah instrumen kerja sama China dengan Indochina yang termasuk di dalamnya adalah Laos.

BRI dan LMC berjalan beriringan, adanya LMC bukan untuk menggantikan BRI namun untuk memperkuat kerja sama antara China dan Laos dalam menjalankan proyek-proyek BRI. LMC dapat menjadi wadah China untuk mencapai kepentingannya melalui proyek-proyek BRI. BRI dan LMC telah membawa perubahan signifikan pada struktur, arah dan lingkungan kebijakan investasi luar negeri China, tetapi juga menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk meningkatkan ukuran dan konten lebih lanjut investasi China di Laos.

Bantuan luar negeri China kepada Laos memiliki kepentingan di baliknya. Laos menjadi signifikan dalam mewujudkan kepentingan tersebut karena secara

¹⁵ Shanghai Institutes for International Studies, 2016, *Assessment and Prospect of China-Laos Development Cooperation*, Hlm. 12

¹⁶ The Belt and Road Initiative, Lehman Brown International Accountant, Edisi 2017, hal. 2.

geografis, Laos berbatasan langsung dengan Yunnan, salah satu provinsi di China. Hal ini menciptakan potensi untuk menghubungkan China dengan seluruh negara di Asia Tenggara melalui transportasi. Laos memiliki banyak lokasi yang strategis dalam transportasi dan pelayanan internasional karena Laos berbagi perbatasan dengan lima negara seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan China¹⁷. Jadi, Laos mempunyai peran dominan dalam menjembatani hubungan China dengan negara di kawasan Indochina. Bukan hanya untuk negara-negara di kawasan Indochina, Laos pun membuka jalur untuk ekspansi China di Asia Tenggara. Dengan terbukanya jalur ini, China dengan leluasa dapat menjalankan strategi politiknya terhadap negara-negara di Asia Tenggara dan untuk mewujudkan konektivitas global.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti melihat bahwa dalam pemberian bantuan luar negeri China kepada Laos memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri. Bantuan luar negeri ini diberikan melalui mekanisme LMC yang di mana bertujuan untuk memperkuat BRI China di Laos. Dengan diberikannya bantuan luar negeri terhadap Laos serta kebutuhan Laos akan pembangunan domestik maka China mempunyai potensi yang besar untuk ekspansi ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, secara akademis peneliti akan membuktikannya dengan menggunakan konsep bantuan luar negeri sebagai landasan dalam menganalisa.

¹⁷ Harsha Udayakantha Peiris, 2019, Laos from being landlocked to a land-bridge through One Belt One Road; a lesson to learn, diakses pada <http://www.ft.lk/other-sectors/Laos-from-being-landlocked-to-a-land-bridge-through-One-Belt-One-Road-a-lesson-to-learn/57-678277> (28/1/2020, 17:42)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, maka pertanyaan yang kemudian muncul melihat kondisi tersebut adalah “**Apa Kepentingan *Belt and Road Initiative (BRI)* China dalam Memperkuat Kerja Sama dengan Laos Melalui Lancang Mekong Cooperation (LMC)?**”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan luar negeri China kepada Laos melalui Lancang Mekong Cooperation
2. Untuk mengetahui kepentingan China dalam memperkuat kerja sama dengan Laos melalui LMC

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis penelitian ini adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana bentuk bantuan luar negeri China terhadap Laos di bawah kerangka kerja sama Lancang-Mekong dan bagaimana China melanggengkan proyek BRI di Laos. Serta, pembaca juga dapat mengetahui strategi politik China dalam memberikan bantuan luar negeri dengan menggunakan pendekatan bantuan luar negeri oleh Carol Lancaster.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai bantuan luar negeri apa saja yang diberikan China kepada Laos. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepentingan China dalam memberikan bantuan luar negeri. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat berkontribusi ilmu untuk mengembangkan kajian ekonomi global dan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para akademisi terutama bidang ilmu sosial dan politik terlebih khusus Hubungan Internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk menganalisa penelitian ini, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini akan menjadi acuan dan pembeda dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu juga diharapkan menjadi tolak ukur serta landasan peneliti untuk meneliti topik yang diambil. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu, penelitian pertama oleh **Sara Lengauer** yang berjudul *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method*¹⁸. Dalam penelitiannya, Sara menjelaskan mengenai bantuan luar negeri adalah bantuan pembangunan yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kebijakan luar negeri. Prioritas kebijakan luar negeri China adalah mempertahankan China yang kuat, mandiri, dan mengejar pembangunan ekonomi.

¹⁸ Sara Lengauer, *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method*, Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies, Vol, 9, No, 2

Dalam dunia bantuan luar negeri, China sebagai pendatang baru pun mulai merubah aturan permainan donor yang mampu meningkatkan bantuan ke negara-negara terbelakang sesuai keinginannya. Bantuan luar negeri China berbeda dengan yang tradisional di mana dalam memberikan bantuan luar negeri, China tidak memaksa untuk menyamakan system politik dan ekonomi pada negara penerima. selanjutnya, Sara menjelaskan mengenai motif negara dalam memberikan bantuan luar negeri. Motif tersebut adalah motif ekonomi, motif politik, dan motif ideologi¹⁹. Motif ekonomi berbicara mengenai pengamanan sumber daya alam seperti minyak, gas, tembaga sekaligus mencari pasar untuk meningkatkan perdagangan. Motif politik mencakup pembentukan diplomasi strategis dan motif ideologi mencakup penyebaran ideologi komunis dan juga meningkatkan kekuatan lunak China.

Penelitian kedua yang ditulis oleh **Hong Yu** berjudul *Motivation behind China's One Belt One Road' initiatives and Establishment of the Asian Infrastructur Invesment Bank*²⁰. Dalam penelitian ini tertulis, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, *One Belt One Road* (OBOR) menjadi inti dari kebijakan luar negeri China. Inisiatif OBOR adalah cerminan dari naiknya China di arena global, secara ekonomi, politik, dan strategis. Mengembangkan inter-konektivitas pembangunan infrastruktur merupakan bagian utama dari inisiatif OBOR China. *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) bertujuan untuk memfasilitasi dan

¹⁹ Ibid, hlm 44

²⁰ Hong Yu, *Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank*, *Journal of Contemporary China*

mempercepat peningkatan infrastruktur di wilayah ini dengan memberikan pinjaman modal dan layanan teknis.

Inisiatif OBOR jauh melampaui kerjasama investasi dan kepentingan ekonomi karena memiliki dasar politis dan strategis yang jelas. Promosi strategi Jalan Sutra baru dan pembentukan AIIB adalah cerminan kebangkitan China sebagai kekuatan global dan akan menarik negara-negara Asia lainnya lebih ke dalam orbit pembangunan China. Inisiatif OBOR akan memajukan kepentingan strategis, politik dan ekonomi China di Asia serta negara-negara di sepanjang rute Jalur Sutra ini. OBOR akan membantu China untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas industri di dalam negeri dan mempercepat restrukturisasi industri dan peningkatan teknologi di dalam negeri.

Penelitian ketiga berjudul *Motivasi Bantuan Pembangunan Infrastruktur Tiongkok kepada Kamboja* oleh **Ahmad Kizwar Durmawel**²¹. Penelitian ini menekankan pada motivasi negara-negara dalam memberikan bantuan luar negeri. Salah satu negara yang aktif memberikan bantuan luar negeri adalah China. Dengan menggunakan konsep motivasi bantuan luar negeri oleh Fransisco Sagasti, penelitian ini menemukan bahwa motivasi menjaga kepentingan nasional yang melatarbelakangi pemberian bantuan luar negeri China. Bentuk-bentuk bantuan luar negeri China kepada Kamboja lebih banyak pada sektor transportasi. Sektor transportasi seperti pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, dan pelabuhan.

²¹ Ahmad Kizwar Durmawel, *Motivasi Bantuan Pembangunan Infrastruktur Tiongkok kepada Kamboja*, Skripsi,

Secara konseptual, motivasi tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional yang menekankan pada, pertama, kepentingan strategis di mana Kamboja menjadi basis politik, ekonomi, dan militer China di kawasan Asia Tenggara karena letaknya yang strategis. Kedua, dukungan politik dan pengakuan di mana Kamboja mengakui *One China Policy*. Dan ketiga, perdagangan dan perluasan pasar di mana Kamboja menjadi penghubung China dengan daratan Asia Tenggara.

Penelitian keempat oleh **Nurjannah Abdullah** yang berjudul *Analisis Geopolitik Kebijakan Ekonomi China di Greater Mekong Sub-Region (GMS) Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)*²². Pada tesis ini, Nurjannah menekankan pada mengapa China meningkatkan partisipasi kerja sama dengan anggota GMS sejak tahun 2005. Tesis ini menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh James Rosenau dan konsep geopolitik Friedrich Ratzel sebagai landasan. Hasil yang ditemukan dalam tesis ini adalah China menggunakan kekuatan ekonominya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah menjaga keamanan nasional, menjaga kedaulatan negara serta membangun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi China sangat ditopang oleh sektor industri. Maka dari itu, dalam bekerja sama dengan GMS telah memberikan keuntungan bagi pemerintahan China sebagai wilayah yang menopang arus ekspor dan impor melalui jalur darat. Selain itu, posisi strategis GMS memberikan *supply* bahan baku industri dan pemenuhan energi untuk

²² Nurjannah Abdullah, *Analisis Geopolitik Kebijakan Ekonomi China di Greater Mekong Sub-Region (GMS) Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)*, Tesis, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

kebutuhan industri China. Dengan demikian, China dalam melakukan kerja sama memiliki motif tersendiri sehingga dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

Penelitian kelima yang dibaca peneliti adalah *Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca Merdeka (2011-2014)* yang ditulis oleh **Putri Dumora Nasution**²³. Penelitian ini berbicara mengenai bantuan luar negeri China kepada Sudan yang memiliki motif yang menguntungkan China. Bantuan luar negeri China diberikan kepada Sudan dan Sudan Selatan walaupun keduanya sedang dalam keadaan konflik. Bantuan yang diberikan China kepada kedua negara tersebut berupa hibah, pinjaman, dan kerja sama teknis. Bantuan ini kemudian memiliki motif yang melatarbelakangi yaitu motif ekonomi, kemanusiaan, dan politik. Penelitian ini pun menemukan bahwa bantuan luar negeri China kepada Sudan dan Sudan Selatan memiliki kesamaan yaitu motif ekonomi. Motif ekonomi China di Sudan dan Sudan Selatan adalah membuka kerja sama baru, memperluas pasar, dan mengamankan suplai energi.

Secara garis besar penelitian terdahulu yang telah dipaparkan ini akan menjadi acuan peneliti untuk menganalisa topik yang diangkat. Selain itu, penelitian terdahulu akan menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan yang lain. Lima penelitian terdahulu peneliti membagi dalam dua hal di mana penelitian pertama dan kedua berbicara mengenai konsep bantuan luar negeri China. Kedua penelitian tersebut sama-sama berbicara mengenai kekuatan ekonomi China yang digunakan sebagai alat mencapai kepentingan nasionalnya. Sedangkan penelitian

²³ Putri Dumora Nasution, *Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca Merdeka (2011-2014)*, Skripsi, Lampung: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Lampung

ketiga, keempat, dan kelima sama-sama berbicara mengenai bantuan luar negeri China pada negara-negara tetangga. Temuan yang peneliti dapat dari penelitian terdahulu ini adalah belum banyak yang membahas tentang bantuan luar negeri China kepada Laos. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil Laos sebagai objek yang dianalisa.

Peneliti menggunakan teori atau konsep bantuan luar negeri di mana tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga fungsi penelitian terdahulu terhadap peneliti dapat dijadikan sebagai acuan penerapan konsep dengan objek yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan bentuk bantuan luar negeri China kepada Laos serta menganalisis motif yang digunakan China dalam memberikan bantuan kepada Laos. Peneliti melihat bahwa bantuan luar negeri China dalam BRI melalui LMC kepada Laos tidak hanya berbicara tentang pengurangan kemiskinan namun juga berbicara mengenai kepentingan China terhadap Laos.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Peneliti dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	China's Foreign Aid Policy: Motive and Method Sara Lengauer	- Deskriptif - Kualitatif - Alat Analisa: Foreign Aid	Pertama, China menggunakan bantuan luar negeri sebagai instrument untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kedua, Motif China dalam memberikan bantuan luar negeri yaitu motif ekonomi, motif politik, dan motif ideologi. Secara umum, China mengamankan sumber

			<p>daya energi seperti minyak dan gas, mengamankan makanan untuk penduduk China. China berupaya membangun pasar konsumen baru untuk produk-produknya yang ditargetkan ke pasar massal dengan kemakmuran terbatas dan dengan demikian kualitasnya terbatas, diproduksi dengan biaya rendah.</p>
2	<p>Analisis Geopolitik Kebijakan Ekonomi China di Greater Mekong Sub-region (GMS) Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)</p> <p>Nurjannah Abdullah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif Analitis - Kualitatif - Alat Analisa: Konsep Geopolitik dan Konsep Politik Luar Negeri 	<p>Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan ekonomi China menjadi instrument interaksi luar negeri untuk mencapai kepentingannya. Secara geopolitik, GMS merupakan sub kawasan yang mempunyai posisi strategis untuk China. Pertama, GMS berada di jantung Asia dan menghubungkan China dengan kawasan Asia Tenggara. Kedua, posisi strategis memberikan keuntungan bagi China sebagai wilayah penopang perputaran barang, dan, Ketiga, Posisi strategis GMS juga menguntungkan China dalam mengakses salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara yakni Indonesia melalui penghubung Thailand sebagai pintu pertemuan</p>

			dengan Aceh melalui jalur perairan
3	<p>Motivasi Bantuan Pembangunan Infrastruktur Tiongkok kepada Kamboja</p> <p>oleh Ahmad Kizwar Durmawel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Eksploratif - Eksplanatif - Alat Analisa: Bantuan Luar Negeri dan Motivasi Bantuan Luar Negeri 	<p>Bantuan luar negeri China kepada Kamboja memiliki motif tertentu yaitu motivasi menjaga kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, Pertama, Kepentingan strategis dan keamanan Kedua, dukungan politik dan pengakuan Ketiga, perdagangan dan peluasan pasar Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan adanya dua motivasi lain yaitu motivasi solidaritas internasional dan motivasi menjaga ketersediaan barang publik internasional dalam pemberian bantuan infrastruktur oleh pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Kamboja</p>
4	<p>Motivation behind China's 'One Belt, One Road' Initiatives and Establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank</p> <p>Oleh: Hong Yu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanatif - Kualitatif - Geopolitik dan geoekonomi 	<p>One Belt One Road (OBOR) menjadi inti dari kebijakan luar negeri China. Inisiatif OBOR adalah cerminan dari naiknya China di arena global, secara ekonomi, politik, dan strategis. Dengan adanya OBOR, China muncul dengan kekuatan ekonomi baru secara global. OBOR akan sangat berdampak pada ekonomi China</p>

			karena didukung oleh pembentukan AIIB.
5	<i>Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca Merdeka (2011-2014)</i> yang ditulis oleh Putri Dumora Nasution.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Deskriptif - Alat Analisa: Bantuan Luar Negeri dan Motif Bantuan Luar Negeri 	<p>Bantuan luar negeri China di Sudan terbagi atas dua yaitu kepada Sudan dan Sudan Selatan. Pembagian yang terpisah ini dikarenakan adanya konflik internal antar keduanya. Bantuan Luar Negeri China berupa Hibah, pinjaman, dan kerja sama teknis. Melalui bantuan luar negeri ini, China memiliki motif untuk mencapai kepentingannya. Motif tersebut adalah motif kemanusiaan, motif ekonomi, dan motif politik.</p>

1.5 Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pernyataan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan dan motif bantuan luar negeri China terhadap Laos melalui Lancang-Mekong Cooperation, peneliti menggunakan konsep bantuan luar negeri oleh Carol Lancaster.

1.5.1 Konsep Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri sangat tersebar dan akrab di negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena kebutuhan negara berkembang terhadap pembangunan. Selain negara berkembang, bantuan luar negeri pun menjadi penting untuk negara maju. Oleh karena itu, bantuan luar negeri menganalisa interaksi dua

aktor yang terdiri dari pendonor dan penerima²⁴. Pendonor dalam hal ini adalah negara maupun organisasi internasional dan penerima dalam hal ini adalah negara-negara yang menerima bantuan. Carol Lancaster dalam bukunya “*Foreign Aid, Diplomacy, Development, and Domestic Politics*” menjelaskan bahwa bantuan luar negeri adalah

*a voluntary transfer of public resources, from a government to another independent government, to an NGO, or to an international organization (such as the World Bank or the UN Development Program) with at least a 25 percent grant element, one goal of which is to better the human condition in the country receiving the aid*²⁵.

Dalam pengertian ini, bantuan luar negeri merujuk pada perpindahan sumber daya publik dari pemerintah pendonor kepada penerima. Bantuan luar negeri tidak termasuk bantuan militer atau pengeluaran militer di luar negeri, pembiayaan perdagangan, suap atau upeti untuk tujuan politik namun sumber daya yang dimaksud dalam hal ini berupa uang tunai yaitu hibah (*grants*) dan pinjaman lunak (*loans*) atau dalam bentuk keringanan utang²⁶. Hal ini sejalan dengan bantuan luar negeri menurut Riddell bahwa bantuan luar negeri bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan dan juga dapat memperluas kegiatan yang membantu mewujudkan tujuan-tujuan domestiknya²⁷.

²⁴ Asra Virgianita, dkk, 2014, *Perkembangan Diskursus dan Implementasi Bantuan Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Sempu, hlm 2

²⁵ Lancaster, Op. Cit, Hlm 9

²⁶ John Alexander White, 1974, *The Politics of Foreign Aid*, London: Palgrave Macmillan, hlm 188

²⁷ Roger C. Riddell, 2008, *Does Foreign Aid Work?*, Oxford: Oxford University Press

Lancaster menjelaskan bantuan luar negeri dalam dua konsep yaitu bantuan luar negeri sebagai *tricky concept* dan bantuan luar negeri sebagai *purposes*²⁸. Bantuan luar negeri sebagai *tricky concept* menjelaskan bahwa bantuan luar negeri kadang-kadang dianggap sebagai kebijakan namun bantuan luar negeri merupakan alat dari kebijakan tersebut²⁹. Secara moral, transfer sumber daya pada dasarnya berbicara mengenai tujuan yang mulia yaitu melakukan pembangunan di negara penerima namun transfer sumber daya tidak hanya berbicara mengenai hal itu. Transfer sumber daya merupakan alat untuk mencapai kepentingan negara penerima³⁰.

Selanjutnya, bantuan luar negeri yang datang dari negara kuat pun memiliki makna yang kuat. Lancaster mengarah pada bantuan luar negeri memiliki simbol dan sinyal politik yang kuat³¹. Sebagai transfer sukarela, bantuan luar negeri dapat berarti simbol. Sebagai contoh, simbol ini dapat dilihat dari penurunan tingkat bantuan yang melambangkan hubungan yang dingin serta penolakan. Selain itu, bisa juga berarti sinyal untuk pemerintahan yang lain untuk menunjukkan bahwa negara pendonor akan berdiri di belakang negara penerima untuk menghadapi tekanan dari negara lain.

Bantuan luar negeri sebagai *purposes* mengarah pada mengapa negara memberikan bantuan kepada negara lain. Konsep ini menekankan pada tujuan-tujuan seperti tujuan diplomatik, pengembangan dan komersialisasi³². Konsep ini

²⁸ Lancaster, Op. Cit, Hlm 9

²⁹ Ibid

³⁰ Samuel P. Huntington, Foreign Aid: For What and for Whom, diakses dalam <https://foreignpolicy.com/2010/12/30/foreign-aid-for-what-and-for-whom/> (22/12/2019,22:30)

³¹ Lancaster, Op. Cit, Hlm 11

³² Lancaster, Op. Cit, Hlm 13

menurut peneliti memiliki makna politik tersendiri untuk negara pendonor. Tujuan diplomatik dalam hal ini merujuk pada keamanan internasional, kepentingan politik luar negeri dan hubungan antar negara. Dengan adanya bantuan luar negeri, negara pendonor menjaga citra baik negaranya di negara yang diberikan bantuan. Sebagaimana yang ditulis oleh Alan Rix bahwa, bantuan luar negeri tidak terlepas dari motivasi kemanusiaan, politik dan kepentingan nasional negara pendonor³³. Sebagai contoh, pemerintah AS memberikan bantuan luar negeri saat perang dingin mempunyai tujuan politik yaitu untuk menandingi pesaingnya yaitu Uni Soviet.

Sedangkan tujuan pengembangan dan komersialisasi berbicara mengenai perluasan akses ekspor suatu negara dan mengamankan akses impor bahan baku yang dibutuhkan³⁴. Negara penerima donor dalam hal ini akan menjadi ladang kegiatan ekonomi negara pendonor. Negara pendonor akan menggunakan tujuan pembangunan untuk memikat negara penerima namun pada dasarnya negara pendonor memiliki tujuan yang lain di balik itu. Umumnya, negara pendonor akan memberikan bantuan luar negeri kepada negara kecil yang memiliki bahan baku mentah. Dalam hal ini, negara pendonor akan membuat hubungan yang lebih dekat secara kooperatif untuk menjaga akses berkelanjutan yang kemudian akan dimanfaatkan oleh China.

³³ Alan Rix, 1993, *Japan Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*, London: Routledge, hlm 18-19

³⁴ Lancaster, Op. Cit, Hlm 14

Bantuan luar negeri tidak hanya berbentuk dana namun juga bisa berupa jasa. Menurut Andy Sumner dan Richard Mallett³⁵, bantuan luar negeri berupa jasa digolongkan dalam 3 bentuk yaitu,

1. Bantuan Program (*Program Aid*)

Bantuan Program (*Program Aid*) adalah bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.

2. Bantuan Proyek (*Project Aid*)

Bantuan ini berbicara mengenai bantuan luar negeri berupa valuta asing kepada negara penerima untuk membiayai kegiatan pembangunan baik dalam rangka rehabilitas, pengadaan barang atau jasa serta perluasan proyek-proyek pembangunan baru.

3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*)

Bantuan ini berbentuk tenaga ahli yang menguasai kemampuan tertentu dan pelatihan kepada tenaga kerja di negara penerima sekaligus memindahkan keahlian tenaga ahli internasional kepada tenaga dalam negeri. Selain tenaga ahli, bantuan ini juga berbentuk peralatan untuk membantu pembangunan.

Dalam penelitian ini, jenis bantuan luar negeri China dalam BRI melalui LMC adalah pembangunan infrastruktur. Dalam dunia ekonomi, tidak ada definisi baku mengenai pembangunan infrastruktur. Menurut Gianpiero, pembangunan

³⁵ Andy Sumner and Richard Mallett, 2013, *The Future Foreign Aid: Development Cooperation and the New Geography of Global Poverty*, London: Palgrave Macmillan, hlm 15

infrastruktur sebagai fasilitas kapital fisik dan kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi dengan tujuan pembangunan ekonomi masyarakat³⁶. Selanjutnya, infrastruktur dibedakan menjadi dua yaitu infrastruktur ekonomi mendukung kegiatan produktif seperti jalan, bandara, transportasi laut, jaringan saluran pembuangan, saluran air, jaringan untuk distribusi air, jaringan gas, jaringan listrik, pabrik irigasi dan struktur yang didedikasikan untuk transfer komoditas. Sedangkan infrastruktur sosial, adalah infrastruktur yang diselesaikan untuk meningkatkan kenyamanan sosial dan untuk bertindak berdasarkan produktivitas ekonomi seperti sekolah, struktur untuk keselamatan publik, pabrik pembuangan limbah, rumah sakit, struktur olahraga, area hijau, dan sebagainya³⁷.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bantuan luar negeri adalah konsep yang rumit karena didasarkan pada motif-motif tertentu. Secara historis, bantuan luar negeri tidak hanya berbicara mengenai moralitas dalam hal mengurangi kemiskinan di negara penerima namun dalam faktanya, sulit ditemukan bantuan luar negeri yang diberikan tanpa dilandasi kepentingan negara pendonor. Alasan moralitas atau kemanusiaan ini dibaluti sedemikian mungkin untuk menutupi motif-motif politik. Maka dari itu, adalah hal yang menarik untuk meneliti kepentingan BRI China dalam memperkuat kerja sama dengan Laos melalui LMC.

1.5.2 Motif Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri memiliki dua aktor penting yaitu *donor* dan *recipient*. Aktor-aktor ini menjalankan proses kerja sama dalam hal bantuan pembangunan.

³⁶ Gianpiero Torrisi, 2009, *Public Infrastructure: definition, classification, and measurement issues*, University of Catania

³⁷ Ibid., Hlm 15

Proses ini mencakup pemberian bantuan luar negeri dalam berbagai bentuk. Pemberian bantuan luar negeri tidak terlepas dari adanya motif yang menjadi elemen penting selama proses pemberian bantuan berlangsung. Motif secara sederhana diartikan sebagai dorongan yang muncul karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Terdapat dua perspektif yang berbeda dalam melihat motif bantuan luar negeri, yaitu *altruism* dan *self-interest*.

Perspektif *altruism* merupakan ide dari konstruktivisme yang menekankan pada negara mempunyai kewajiban moral untuk membantu negara lain dengan menyumbangkan bantuan dan tidak memperhitungkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan perspektif *self-interest* merupakan ide dari pandangan realisme yang berbicara mengenai negara-negara donor memberikan bantuan asing untuk meningkatkan keamanan fisik mereka, pengaruh material terhadap yang lain dan memajukan kepentingan ekonomi mereka³⁸. Namun dari kedua perspektif ini terdapat satu paradigma yang menjadi penengah yaitu *enlightened Self-Interest*³⁹.

Enlightened Self-Interest diwakili oleh paradigma liberalisme di mana para donor memberikan bantuan luar negeri dengan tujuan memproduksi barang publik global, stabilitas dan mengatasi masalah yang berasal dari ketidaksetaraan global⁴⁰. Selanjutnya, Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen menekankan bahwa *Enlightened Self-interest* merupakan konsep yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri tidak hanya untuk kepentingan nasional, namun juga hubungan yang saling menguntungkan. Dalam memberikan bantuan luar negeri, Degnbol-Martinussen

³⁸ Onur Sen, *Strategic Aid: Explaining the Motives and Choices of International Donors*, Disertasi, Departement of Political Science, Georgia State University, hlm 39

³⁹ Lancaster, Op. Cit, Hlm 12

⁴⁰ Ibid, Omer 39

and Engberg-Pedersen melalui bukunya *Aid Understanding International Development Cooperation*⁴¹ membagi motif bantuan luar negeri menjadi tiga jenis yaitu motif politik, motif ekonomi, dan motif kemanusiaan.

Motif politik berbicara mengenai instrumen utama yang digunakan negara donor untuk mencapai keamanan nasional dan kepentingan politik⁴². Lebih lanjut, motif politik berbicara mengenai pentingnya mempertahankan hubungan jangka panjang antara pendonor dengan penerima. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengukuhkan negaranya menjadi negara yang bercitra baik agar nantinya dapat menguatkan strategi diplomasinya. Dengan adanya stigma baik ini, negara pendonor dapat menguatkan ikatan yang dapat mempererat hubungan kedua pihak agar nantinya negara pendonor dapat diakui secara internasional oleh negara-negara lain.

Motif ekonomi berasumsi bahwa adanya bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi negara donor⁴³. Motif ekonomi sering menjadi alasan utama negara pendonor untuk memberikan bantuan luar negeri. Dengan adanya bantuan luar negeri, negara pendonor dapat mengamankan pasokan sumber daya alam untuk kepentingannya. Selain itu, motif ekonomi berbicara mengenai perluasan akses pasar di negara tujuan. Hal ini merujuk pada ekspor dan impor. Dalam hal ekspor, negara donor dapat menciptakan peluang bagi negaranya untuk menambah pendapatan dari hasil penjualan barang-barangnya di negara

⁴¹ Degnol-Martinussen and Engberg-Pedersen, 2003, *Aid: Understanding International Development Cooperation*

⁴² Sara Lengauer, *China's Foreign Aid Policy: Motive and Method*, Culture Mandala: Bulletin of the Centre for East-West Cultural & Economic Studies, Vol, 9, No, 2, hlm 44

⁴³ Roger C. Riddle, 2007, *Does Foreign Aid Really Work*, University Press: Oxford, hlm 98

penerima. Negara penerima menjadi ladang kepentingan ekonomi negara pendonor.

Selanjutnya, motif kemanusiaan menekankan pada nilai moral negara pendonor untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga. Sebagai besar pemerintah menyatakan bahwa ada alasan moral bagi mereka untuk memberikan bantuan. Negara pendonor secara eksplisit menyatakan bahwa mereka memiliki semacam kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan. Dalam memberikan bantuan luar negeri, negara pendonor dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, motif kemanusiaan berfokus pada mengurangi ketidaksetaraan yang terus meningkat agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera⁴⁴. Pada motif ini, bantuan luar negeri disalurkan melalui kerangka kerja sama ekonomi yang bersifat murni dan berakar pada motif moral dan kemanusiaan⁴⁵.

Dari indikator di atas, peneliti akan menggunakan paradigma *Enlightened Self-interest* yang terejawantahkan dalam tiga motif yang dikemukakan oleh Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen. Maka dari itu, pelaksanaan bantuan luar negeri yang diberikan China kepada Laos akan dianalisa menggunakan konsep bantuan luar negeri. Secara singkat penelitian ini akan membahas alasan di balik pemberian bantuan luar negeri China di Laos dalam proyek-proyek BRI yang dialokasikan melalui LMC sebagai organisasi sub daerah. Terdapat tiga motif bantuan luar negeri yaitu motif politik, motif ekonomi dan motif kemanusiaan.

⁴⁴ Roger C. Riddle, 2007, *Does Foreign Aid Really Work*, University Press: Oxford, hlm 141

⁴⁵ D. Martinussen, Op. Cit, hlm 13

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah cara untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sederhana namun sistematis tentang fakta-fakta dan karakteristik objek-objek dan subjek yang diteliti secara tepat.⁴⁶

1.6.2 Metode Analisa

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menganalisa data yang menunjukkan kualitas dari suatu fenomena yang dituangkan ke dalam bentuk perkataan⁴⁷. Sehingga peneliti di sini mengumpulkan informasi-informasi (data kualitatif) yang mendukung penelitian ini.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan batasan materi untuk menghindari terlalu melebarinya objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan memberi batas-batas yang menjadi fokusnya. Batas-batas ini nantinya akan membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan objek penelitian. Fokus dalam penelitian ini yang merujuk pada konsep bantuan luar negeri oleh Carol Lancaster. Peneliti akan berfokus pada motif China dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Laos. Terdapat tiga motif yang paling mungkin

⁴⁶ Yanuar Ikbar, *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal.17

⁴⁷ Endi Haryono dan Saptopo B. Ilkodar, 2005, *Menulis Skripsi: Panduan untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 44

merujuk pada BRI dan LMC yaitu motif kemanusiaan, motif politik, dan motif ekonomi.

b. Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini sejak 2013-2019. Hal ini dikarenakan China mengagas BRI pada tahun 2013 dan dua tahun setelahnya China mengesahkan *Lancang Mekong Cooperation* yang diinisiasi oleh Thailand. Dalam rentang waktu ini, peneliti akan berfokus pada bantuan luar negeri China kepada Laos dengan melihat kerja sama yang telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan antara kedua negara.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga peneliti harus menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. Data-data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini

Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan umum Universitas Muhammadiyah Malang. Juga dari beberapa sumber data berbasis daring yakni jurnal, website, dan artikel yang terdapat data yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data

informasi yang diperoleh diadakan *cross checking* data tersebut menunjukkan adanya *reliable* data yang akan dianalisa.

1.7 Argumen Dasar

Argumen dasar yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini adalah dalam memberikan bantuan luar negeri, China tidak hanya mengedepankan tujuan moral namun juga mengedepankan kepentingannya sendiri. Hal ini dilihat dari konsep bantuan luar negeri oleh Carol Lancaster yang mengatakan bahwa bantuan luar negeri memiliki sinyal politik yang kuat. Motif tersebut bisa dilihat dalam tiga aspek yaitu motif kemanusiaan, motif politik, dan motif ekonomi. Motif kemanusiaan berbicara mengenai bagaimana China memiliki tanggung jawab moral kepada Laos sebagai negara berpenghasilan rendah sehingga memberikan bantuan luar negeri. Motif politik China dalam bantuan luar negeri kepada Laos untuk menjaga keamanan nasional karena berbatasan langsung dengan Laos serta menyaingi dominasi negara pendonor lain di Laos sehingga BRI akan berjalan lancar. Kepentingan yang terakhir adalah kepentingan ekonomi yaitu China bisa mengamankan ekspor dan impor di Laos serta mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan kepada negara pendonor.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa BRI pada dasarnya merupakan inisiatif penghormatan dan moral tetapi juga memastikan adanya keterbukaan akses sumber daya dan pasar yang lebih besar sehingga dapat menguntungkan negara pendonor dalam hal ini adalah China.

1.8 Sistematika Penelitian

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Konsep Bantuan Luar Negeri 1.5.2 Konsep Motif Bantuan Luar Negeri 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Penelitian 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian a. Batasan Materi b. Batasan waktu 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Sementara 1.8 Sistematika Penelitian
BAB II	GAMBARAN UMUM HUBUNGAN CHINA DENGAN LAOS DALAM KERANGKA KERJA SAMA LANCANG MEKONG COOPERATION
	2.1 <i>Belt and Road Initiative</i> Sebagai Kebijakan Luar Negeri China 2.2 Hubungan China dengan Laos 2.3 Proyek <i>Belt and Road Initiative</i> di Laos 2.4 <i>Lancang-Mekong Cooperation</i>
BAB III	ANALISA KEPENTINGAN <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i> (BRI) CHINA DALAM MEMPERKUAT KERJA SAMA DENGAN LAOS MELALUI LANCANG MEKONG COOPERATION (LMC)
	3.1 Kepentingan Politik 3.2 Kepentingan Ekonomi 3.3 Kepentingan Kemanusiaan
BAB IV	PENUTUP
	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran